

**Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi TPI Depok Daerah Istimewa Yogyakarta)**

***Optimizing the Role of Fish Auction Place (TPI) as Center for Development Welfare the Coastal Communities in Support of National Defense (Study of TPI Depok Special Region of Yogyakarta)***

**Jumsin Sobri, Supartono, Tatan Kustana**  
Program Studi Keamanan Maritim  
Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan  
Jumsin.sobri@gmail.com

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia jadi tidak berlebihan bila negara kita memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Potensi kelautan dan perikanan DIY masih belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini terlihat dari data potensi kelautan dan perikanan yang besar namun di sisi lain, kebutuhan ikannya belum dapat dipenuhi secara mandiri. Tempat pelelangan ikan merupakan Salah satu infrastruktur ekonomi dasar yang harus ada di wilayah pesisir yang memiliki peran cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: a) peran TPI Depok sebagai pusat pengembangan kesejahteraan masyarakat pesisir, b) mengoptimalkan peran TPI Depok dalam mendukung pertahanan negara di kawasan pesisir. Penelitian ini melakukan analisis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara sebagai data primer serta pengumpulan dokumen, buku serta jurnal sebagai sumber data sekunder. Setelah itu dilihat bagaimana optimalisasi peran TPI untuk pengembangan masyarakat pesisir dalam mendukung pertahanan negara. Hasil penelitian menunjukkan tempat pelelangan ikan Depok sudah dilaksanakan secara baik namun belum optimal menjalankan perannya dalam pengembangan masyarakat pesisir untuk mendukung pertahanan negara. Oleh karena itu diperlukan perbaikan terhadap kebijakan, manajemen, pengawasan mulai dari kementerian, dinas serta pihak-pihak terkait dalam sektor perikanan dan kawasan pesisir.

**Kata Kunci :** Peran, Tempat Pelelangan Ikan, Kesejahteraan, Pertahanan

**ABSTRACT**

Indonesia is the largest archipelagic country in the world so it is not excessive if our country has huge marine potential. The potential of marine and fishery of DIY is still not utilized maximally, it can be seen from the data of marine and fishery potential that big but on the other hand, the need of the fish can not be fulfilled independently. Fish auction site One of the basic economic infrastructure that must exist in coastal areas that have a role important enough to create a conducive climate in the marketing of fish to improve the welfare of coastal communities. This study aims to analyze: a) the role of TPI Depok as a center for coastal community welfare development, b) optimize the role of TPI Depok in supporting the country's defense in coastal areas. This research performs analysis with qualitative method with data collecting

*technique done by observation, interview as primary data and collecting document, book and journal as secondary data source. Afterwards it was seen how to optimize TPI's role for coastal community development in supporting state defense. The results show where the fish auction Depok has been implemented well but not yet optimally run its role in the development of coastal communities to support the country's defense. Therefore, it is necessary to improve policy, management, supervision from ministries, agencies and related parties in fisheries and coastal areas.*

**Keywords:** Role, place the fish auction, welfare, defense

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dengan hampir 2/3 wilayahnya adalah wilayah perairan sehingga menjadikan negara ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini telah ditegaskan dalam konstitusi kita yaitu pasal 25 A UUD 1945, jadi tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Pemerintah saat ini juga sedang menggalakkan program yang diarahkan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

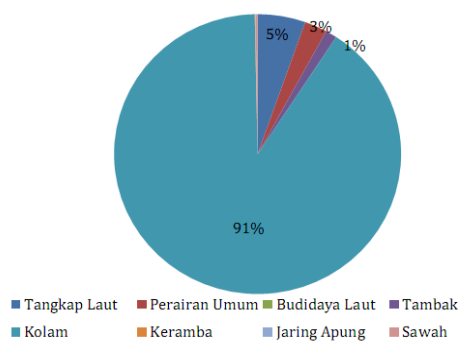
Potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia harusnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, namun untuk itu Indonesia harus memiliki sumber daya manusia atau kinerja yang profesional guna meningkatkan dan menjaga potensi tersebut. Potensi sumberdaya alam tersebut mencakup sumberdaya alam yang dapat diperbaharui maupun sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain mineral dan tambang. Potensi-potensi sumberdaya alam tersebut mempunyai prospek pengembangan sektor perekonomian wilayah untuk saat ini dan di

masa mendatang yang sangat berperan bagi upaya pembangunan wilayah maupun nasional.

Berdasarkan salah satu ringkasan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019, salah satu bentuk pengembangan wilayah pertahanan adalah dengan membangun aspek ekonomi dibidang kemaritiman dan kelautan Indonesia yang nantinya dari pengembangan sektor ekonomi ini diharapkan warga negara khususnya wilayah pesisir dapat memiliki surplus ekonomi dalam kegiatan produksinya, yang nantinya akan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pajak yang digunakan untuk membiayai sektor pertahanan dan non pertahanan.

Salah satu daerah pesisir yang saat ini fokus terhadap pengembangan sektor maritim dan kelautan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi sumber daya kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah besar. Dimana DIY memiliki panjang pantai lebih dari 113 km dengan potensi perikanan tangkap mencapai 491.700 ton per tahun di laut selatan

pulau Jawa, sedangkan potensi lahan budidaya ikan mencapai 18.129,3 Ha. Jumlah ini belum ditambah dengan potensi sumber daya lahan wilayah pesisir yang dapat digunakan usaha perikanan baik dalam budidaya tambak (kolam atau terpal) yang luasnya mencapai kurang lebih dari 650 Ha. Menurut data BPS dibawah, sebagian besar produksi ikan terbanyak berasal dari budidaya ikan di kolam tambak serta perikanan tangkap laut.



Gambar 1. Jumlah Hasil Tangkapan Ikan di DIY

Sumber: BPS 2013

Potensi wilayah pesisir dan laut DIY untuk saat ini dirasa masih belum optimal pengelolaannya, karena upaya eksploitasi yang dilakukan masih belum maksimal, sehingga masih banyak potensi sumberdaya yang belum tergali dan teridentifikasi. Upaya eksploitasi yang telah dilakukan cenderung kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam yang ada (*sustainable*), sehingga akibatnya potensi sumberdaya alam tersebut di masa mendatang dapat terancam keberadaannya. Aspek kelestarian lingkungan

dipengaruhi adanya kegiatan di darat. Melihat potensi kelautan dan perikanan di DIY, maka perlu adanya langkah optimalisasi bisnis perikanan daerah pesisir laut selatan DIY.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya peran lembaga atau organisasi yang mewadahi dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi pesisir. Agus Syarif (2011:69) menyatakan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah satu contoh dari infrastruktur ekonomi dasar yang semestinya ada di wilayah pesisir dimana terdapat sentra-sentra nelayan di dalamnya. Mahyuddin (2001) mengatakan bahwa kegiatan jual beli atau pelelangan ikan adalah salah satu kegiatan di pelabuhan perikanan termasuk dalam aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Karena tempat pelelangan merupakan salah satu mata rantai tata niaga ikan di wilayah pesisir atau pelabuhan. Susilowati (2004) Tempat Pelelangan Ikan bertugas dalam menyelenggarakan pemasaran atau pelelangan hasil tangkapan nelayan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja serta meningkatkan nilai tawar nelayan ketika berhadapan dengan pembeli.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa TPI merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak pada sektor pemasaran hasil tangkapan ikan yang diharapkan dapat

berperan penting dalam membantu penjualan dan memberikan perlindungan bagi para nelayan dan pemberdayaan masyarakat baik dari segi kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan juga merupakan bagian dari fungsi TPI sebagai pusat pengembangan wilayah pesisir.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran TPI Depok di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pengembangan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir serta menganalisis cara mengoptimalkan peran dan yang dilakukan TPI Depok dalam mendukung pertahanan negara di kawasan pesisir khususnya pada sektor ekonomi maritim Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. METODE PENELITIAN**

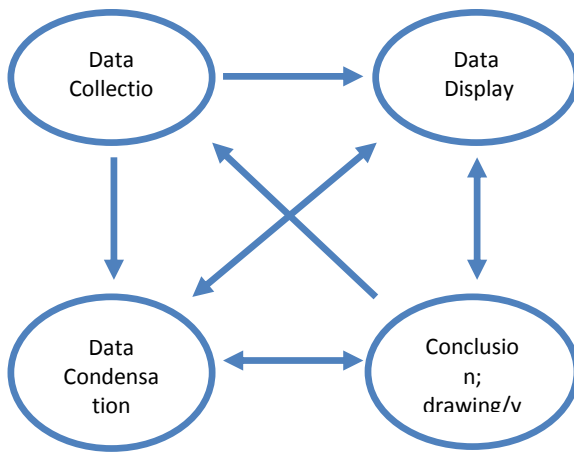
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk lebih menekankan pada proses dari hasil suatu aktivitas sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana

peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Penelitian ini, lebih menekankan pada proses dari hasil suatu aktivitas sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan karena peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran Tempat Pelelangan Ikan Depok dalam upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam mendukung pertahanan negara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisa masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, pada penelitian ini, subjek penelitian meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Bappeda Kabupaten Bantul dan dinas lainnya yang terkait termasuk didalamnya pengurus Tempat Pelelangan Ikan Depok.

Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, *et al* (2014). Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan analisis kualitatif.



Gambar 2. *Components of Data Analysis: Interactive Model*

Tahapan penelitian setelah pengumpulan dan pengolahan data adalah analisis, yaitu suatu proses untuk menghasilkan informasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Analisis disini menggunakan analisis dari peran TPI dan juga pada analisis ini akan dipelajari seluruh segmen dalam lingkungan internal dan eksternal yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara yang berisikan pertanyaan kunci untuk mengetahui *Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi TPI Depok Daerah Istimewa Yogyakarta)*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

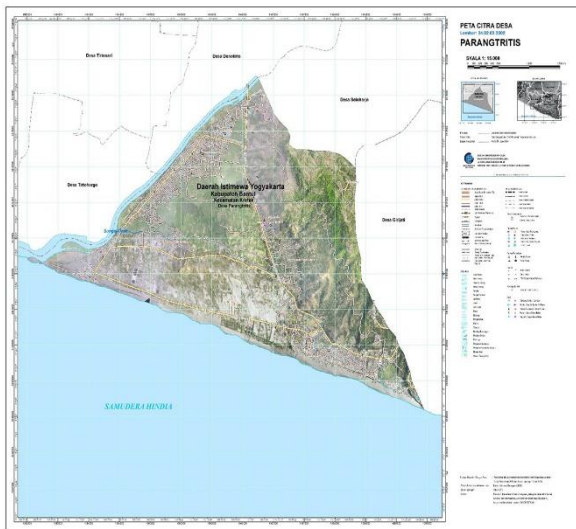
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok berada dalam rangkaian wilayah Pantai Selatan di Kabupaten Bantul. Dalam administratif pemerintahan, TPI Depok terletak di wilayah daerah selatan Pulau Jawa, sehingga sering dikatakan Pantai Laut Selatan. Adapun wilayah Pantai Depok masuk dalam Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DIY dengan luas wilayah desa sebesar 11,87 Km<sup>2</sup>. Jarak antara Desa Parangtritis dengan ibukota Kecamatan Kretek sekitar 2 km dan dapat ditempuh dalam waktu sepuluh menit. Sedangkan dengan jarak dengan ibukota Kabupaten Bantul berjarak 16 km dengan waktu tempuh 30 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor yang umum digunakan oleh masyarakat di desa tersebut.

Secara geografis Desa Parangtritis terletak pada bujur (*Longitude*) adalah 110°19'10" dan Lintang (*Latitude*) adalah 7°59'37". Adapun untuk batas-batas wilayah Desa Parangtritis (gambar 4.1) sebagai berikut:

- Utara : Desa Donotirto
- Selatan : Samudra Indonesia
- Barat : Desa Tirtohargo
- Timur : Desa Seloharjo atau  
Desa Girijati

Topografi Desa Parangtritis terdiri dari dataran (88,59%) dan perbukitan sampai pegunungan

(11,41%). Sedangkan ketinggian tanah dari permukaan laut adalah sampai dengan 56 m, dengan suhu minimum 25 derajat celsius dan suhu maksimum 32 derajat celsius, dengan curah hujan tertinggi pada bulan April 2015 yaitu 963 mm per tahun yang tercatat pada stasiun pemantau curah hujan Gedongan.



Gambar 3. Peta Citra Desa Parangtritis

Kondisi *hidrologi* atau perairan di Desa Parangtritis termasuk dalam kategori baik karena curah hujan lumayan tinggi, sehingga aliran air permukaan serta aliran air tanah cukup baik dan mampu mengairi ladang pertanian warga desa yang bertani ketika sedang tidak melaut, dan untuk ketersediaan air bersih di Desa Parangtritis ini juga cukup baik. Untuk kondisi *oceanografi* seperti arus gelombang di desa Parangtritis ini terhitung dalam kategori kurang aman karena tidak adanya penghalang yang berfungsi sebagai pelindung dan pemecah gelombang sebelum memasuki desa Parangtritis, Untuk padang dan

gelombang tertinggi di desa ini biasanya terjadi antara pertengahan sampai akhir bulan sekitar 18-20 setiap bulannya. Pantai depok memiliki luas kurang lebih 25 ha. Fasilitas yang diberikan cukup banyak selain terdapat Tempat Pelelangan Ikan juga terdapat pasar ikan sehingga para pengunjung dapat membeli ikan yang masih *fresh*, dan disana juga banyak tersedia rumah makan yang dapat memanjakan para pengunjung dengan sajian kuliner dengan ikan segar.

Mata pencaharian utama penduduk Desa Parangtritis yang dominan adalah terletak pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan sebagian pada sektor pariwisata, perdagangan, transportasi dan jasa. Pada sektor pertanian, komoditas tanaman petani parangtritis antara lain padi, cabai, bawang merah dan tanaman palawija dan untuk kegiatan di sektor perikanan antara lain budidaya ikan tawar, tambak udang, nelayan dan pengolahan ikan. Pada sektor peternakan menjadi salah satu komponen pendukung ekonomi masyarakat Parangtritis, karena rata-rata setiap keluarga memiliki salah satu hewan ternak baik sejenis unggas, kambing maupun sapi, dan ini merupakan menjadi hasil tambahan masyarakat ketika pada saat tidak melaut atau tidak sedang musim ikan..

Pada bidang sektor pariwisata di Desa Parangtritis semakin berkembang karena mempunyai banyak tempat wisata seperti

kawasan kuliner Pantai Depok, Pantai Parangtritis, laguna Depok, Pantai Cemara Sewu dan masih banyak lagi. Untuk sektor pariwisata tidak terlepas dari sektor perdagangan dan jasa. Ketiga sektor ini saling mendukung untuk menciptakan tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan. Beberapa contoh kegiatan masyarakat di bidang jasa pariwisata adalah penyewaan ATV di Pantai Depok dan Pantai Parangtritis. Pantai Depok pengunjung juga dapat langsung membeli ikan dan dimasak ditempat karena banyak terdapat rumah makan yang menyediakan jasa pengolahan ikan yang baru dibeli dan ingin segera disantap disana.

Perkembangan sarana dan infrastruktur transportasi di Desa Parangtritis mulai dilakukan pada tahun 1980. Jaringan jalan utama dan penghubung sebelumnya hanya berupa batu dan material tanah mulai diaspal. Pada tahun 1989 dibangun jembatan melintasi Sungai Opak yang menghubungkan antara Desa Parangtritis dan Desa Donotirto. Jembatan ini dikenal dengan nama Jembatan Kretek. Tempat wisata yang mulai dikenal adalah Pantai Depok. Pantai Depok mulai diresmikan tahun 1998. Perkembangan ekonomi warga di sekitar Pantai Depok mulai meningkat. Dusun Depok mampu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan dusun yang lain.

Tempat Pelelangan Ikan Depok berlokasi di sekitar pantai Depok yang juga masih termasuk ke dalam kompleks pantai laut selatan selain Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok berdiri sejak tahun 1998 yang diberi nama dengan Mina Bahari Empat Lima. Nama tersebut terdiri dari dua makna yang berbeda, Mina Bahari berarti ikan dilaut sedangkan Empat Lima sendiri diambil dari nama dusun/desa Parangtritis yaitu Bungkus dan Depok, Bungkus merupakan dusun nomor empat dan Depok adalah dusun nomor lima, sehingga masyarakat setempat sepakat untuk menamai TPI yang berada di Pantai Depok ini dengan nama TPI Mina Bahari Empat Lima Depok Kretek Bantul Yogyakarta yang mayoritas anggotanya merupakan penduduk dari dusun Bungkus dan Depok.

Tujuan didirikannya TPI Depok adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan membantu para nelayan untuk menjual ikan-ikan hasil tangkapannya. Masyarakat disekitar TPI Depok sendiri tidak bekerja sebagai nelayan sepenuhnya, terutama bagi kaum wanita. Pada umumnya, para nelayan adalah laki-laki, sedangkan penduduk wanita menjadi pedagang makanan dan membuka tempat makan yang menyediakan jasa pengolahan ikan yang baru dibeli dan ingin segera disantap di Pantai Depok. Pemerintah sendiri mendukung

dengan membangun beberapa infrastruktur seperti pasar, kemudian fasilitas pendukung lainnya.

Menurut salah seorang pengurus TPI Depok, anggota TPI Depok seluruhnya merupakan penduduk dari dusun Depok dan Bungkus, namun untuk nelayan tidak semuanya berasal dari warga sekitar Pantai Depok, ada yang berasal dari luar daerah ini seperti Cilacap. Nelayan yang berasal dari daerah Depok secara otomatis akan masuk sebagai anggota TPI Mina Bahari Empat Lima, sedangkan nelayan pendatang atau nelayan Andon bukan merupakan anggota tetap, karena mereka sering berpindah-pindah tempat dan tidak menetap di Pantai Depok. Nelayan ini biasanya datang pada saat ada musim ikan saja dan apabila sudah tidak musim, mereka akan berpindah tempat lagi.

Daerah Pantai Depok memiliki potensi ikan yang sangat besar. Ikan yang dihasilkan dari laut sekitar Pantai Depok sangatlah beragam. Bawal, tenggiri, jahan, tombol, hiu, teri, pari, udang, kakap, tongkol, dan banyak jenis ikannya. Dilihat dari tingginya potensi perikanan tangkap di daerah pantai Depok diatas tentunya perlu adanya peningkatan dari segi pengelolaan yang baik secara optimal dan juga sarana-prasarana serta infrastruktur yang cukup memadai untuk meningkatkan produktivitas dan beberapa komoditas ikan

tersebut tanpa perlu merusak lingkungan serta dapat berkelanjutan produktivitasnya.

Nelayan adalah orang yang hidup dan menggantungkan mata pencahariannya dari hasil laut. Jadi dapat dikatakan bahwa nelayan merupakan suatu kelompok orang yang mempunyai mata pencaharian dari hasil tangkap ikan atau hasil laut lainnya dan berdiam diri di desa-desa yang dekat dengan laut atau pesisir (sastrawidjaya. 2002:45)

TPI dilihat dari manajemen operasi dapat diartikan sebagai penjual jasa yang didalamnya mencakup tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan motor atau mesin kapal, perbaikan jala atau jaring. Dengan luas wilayah pantai tersebut, sepatutnya harus ada pintu yang menjembatani antara para nelayan yang ingin menjual hasil tangkapannya dengan harga yang pantas dan kepada para pembeli juga bisa menawar dengan harga yang sesuai sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Secara fungsional, TPI juga bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dan ketersediaan ikan bagi masyarakat.

## **B. Peran TPI Depok di DIY Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pesisir**

Secara teoritis, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan.

Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan (kartodirdjo, Sartono: 1993) sedangkan dari makna yang luas, masyarakat pesisir dapat pula diartikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi pemindahan lain.

Di daerah Pantai Depok, nelayan digolongkan menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis pekerjaannya dan berdasarkan statusnya. Nelayan berdasarkan jenis pekerjaannya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nelayan darat dan nelayan laut. Nelayan darat adalah orang yang bertugas mendorong dan menarik kapal, maksudnya adalah mendorong kapal jika ada kapal yang akan pergi melaut dan menarik kapal jika ada kapal yang akan menepi ke pantai. Sedangkan nelayan laut adalah orang yang menangkap ikan dilaut. Yang selanjutnya adalah kelompok nelayan berdasarkan statusnya. Nelayan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nelayan tetap dan nelayan andon. Nelayan tetap adalah orang-orang asli Depok yang menjadi nelayan di Pantai Depok, nelayan tetap inilah yang biasanya menjadi nelayan darat saat tidak musim ikan, tetapi saat musim ikan mereka juga menjadi nelayan laut dan nelayan darat. Sedangkan nelayan Andon adalah nelayan dari luar yang melaut di wilayah pantai Depok.

Nelayan pantai Depok disatukan sebuah organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari yang memfasilitasi para nelayan dalam penjualan atau pemasaran ikan yang ada. Tidak hanya dalam pemasaran TPI ini juga bergerak dalam sektor penangkapan dan pengolahan laut. TPI Mina Bahari ini adalah organisasi koperasi nelayan sekaligus sebagai tempat pelelangan ikan di pantai Depok.

Potensi hasil laut di wilayah pesisir laut Jawa masih sangat melimpah terutama di wilayah Pantai Depok. Potensi di pantai ini baru mulai digali ditahun 1998 sejak ada krisis moneter melanda Indonesia. Keberadaan nelayan ini didesak kebutuhan ekonomi yang semakin beragam dan mendesak, namun, hasil pertanian yang masih belum jelas masa panennya membuat masyarakat beralih menjadi nelayan. Sampai saat ini, potensi kelautan di wilayah Pantai Depok sudah digali selama hampir 20 tahun.

Sehingga peran dari TPI ini sangatlah signifikan guna menciptakan kondisi pasar yang saling menguntungkan baik untuk pihak nelayan, masyarakat penyedia jasa di sekitar TPI dan juga bagi para pembeli yang datang baik yang khusus membeli ikan atau yang ingin berekreasi di sekitaran lokasi Pantai Depok dan pantai sekitarnya.

Aktivitas nelayan dapat dilihat dari mulai mempersiapkan jaring dan perahu untuk melaut. Pada siang hari dapat dilihat

perjuangan nelayan melawan deras dan tingginya ombak pantai selatan untuk menurunkan perahunya ke laut. Tidak mudah mereka bisa menembus ombak dan bahkan kadang-kadang harus mengurungkan niatnya jika kondisi ombak tidak bersahabat untuk melaut. Untuk mendapatkan tangkapan ikan yang cukup bisa memerlukan waktu 12-24 jam. Para nelayan tersebut kembali mendarat pada waktu malam menjelang pagi meskipun ada sebagian yang mendarat di waktu siang hari.

Kegiatan pengelolaan perikanan yang saat ini dijalankan tidak hanya berkonsentrasi pada aktivitas perikanan saja, tetapi juga aktivitas pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan tempat pelelangan ikan. Setiap kegiatan pasti memiliki target yang ingin dicapai, khusus dalam penelitian ini adalah dari pemerintah baik dinas provinsi maupun kabupaten, nelayan, dan juga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa analisis terkait peran dari TPI Depok dalam mengembangkan wilayah pesisir Pantai Depok, diantaranya:

- a. Pendapatan nelayan, dimana dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Depok telah menjadikan pergeseran pola penjualan ikan yang bersifat tradisional atau pasar krumunan yang dijual langsung dari nelayan menjadi lebih terpusat, perubahan pola penjualan tersebut menjadikan harga ikan semakin baik.

Pendapatan nelayan dapat naik walaupun hasil tangkapan mereka sedikit karena harga jual yang lebih baik dan merata. Hal ini dibenarkan oleh pengurus dari TPI Depok dan juga masyarakat sebagai nelayan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi akan adanya TPI karena tidak hanya mewadahi, namun TPI juga menjadi regulator bagi para nelayan, TPI juga berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait seperti Polisi Air dan Angkatan Laut dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta keselamatan dari para nelayan.

- b. Pendidikan, banyak masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya pendidikan dan sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi anak-anak nelayan anggota TPI Mina Bahari Empat Lima atau TPI Depok. Sejauh ini, TPI sudah menjalankan perannya dengan baik, dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Pantai Depok. Untuk para nelayan sendiri, TPI bekerjasama dengan dinas terkait untuk menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan serta memberikan bantuan kepada para nelayan. Jangka waktu pembinaan ini adalah 2 bulan sekali, sedangkan untuk bantuan itu tidak menentu waktu pemberiannya.
- c. Kesehatan, Dalam hal kesehatan, dengan mutu lingkungan yang makin membaik

maka tingkat kesehatan masyarakat nelayan pun meningkat pula. Keadaan kesehatan masyarakat nelayan di pantai depok sangat erat dengan pola hidup nelayan. Dengan pendapatan nelayan Pantai Depok yang semakin meningkat, sebagian dari mereka mulai dapat membangun rumah yang sudah memenuhi syarat kesehatan. Sehingga aktivitas MCK (mandi, cuci, kakus) sudah dapat dilakukan di rumah mereka sendiri.

Sejauh ini, TPI sendiri sudah dikatakan mampu untuk mewadahi kebutuhan masyarakat dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat yang awalnya hanya bekerja sebagai petani kemudian beralih menjadi nelayan dan bahkan ada yang melakukan keduanya sebagai mata pencaharian. Masyarakat sendiri sangat mendukung adanya TPI karena mereka merasa sangat terbantu baik untuk menjual hasil tangkapannya atau sebagai wadah yang menaungi kelompok nelayan yang ada di dusun Bungkus dan Depok dan hal ini juga tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kedua dusun ini, namun juga dusun sekitar dan juga nelayan yang datang untuk mencari ikan di wilayah sekitar Pantai Depok.

Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya TPI yaitu untuk mensejahterakan masyarakat khususnya yang tercakup dalam lingkup daerah mina bahari 45, yaitu masyarakat di dusun Bungkus dan dusun Depok. Dengan adanya TPI,

andalan masyarakat awalnya adalah bertani dan banyak dari pada masyarakat yang membuat produk gula jawa untuk diperjual belikan dan mencari nafkah, maka dari itu, seiring perjalanan waktu, banyak masyarakat mulai berfikir untuk menggali potensi dari laut selatan disekitar mereka. Sehingga pada tahun 1998, saat adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, pemerintah daerah mendatangkan 3 kapal yang diuji coba untuk memasuki wilayah pantai depok.

Namun, menurut hasil wawancara kepada pengelola TPI dan dinas terkait, pengembangan TPI jika dilihat dari sudut pandang pendistribusian dapat dikatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dalam pendistribusian, semua ikan yang berhasil di tangkap dan jual melalui TPI semua laku terjual. Yang menjadi kendala paling besar adalah tidak menentunya hasil tangkapan dari para nelayan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti cuaca, ombak dan lain sebagainya. Kemudian kendala yang paling signifikan lainnya adalah tidak adanya dermaga atau tempat kapal bersandar ke daratan. Hal ini karena kondisi alam tidak mendukung. Selain itu, terjadi pendangkalan daratan karena kondisi ombak yang kurang menentu dan juga pergeseran muara karena kondisi alam yang tidak bisa ditentukan. Sehingga dibutuhkan teknologi yang sangat mumpuni.

Selain itu, Untuk ukuran wilayah Mina Bahari 45, rata-rata hasil tangkapannya adalah 5-6 ton. Untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat, jumlah ini sangatlah sedikit karena kebutuhan masyarakat terbagi dengan wisatawan yang datang kepantai. Jika dijumlahkan, kebutuhan dalam 1 tahun itu mencapai 300 ton ikan untuk mencukupi kebutuhan ikan bagi masyarakat dan para pendatang. Sebagai pengelola, jika terjadi hal seperti ini, para pengurus dan pengelola sudah siap untuk mendatangkan pasokan ikan dari daerah lain khususnya dari wilayah pantura.

Hal ini juga karena kapal yang beroperasi di wilayah pantai depok ini masih kapal kecil, sedangkan kapal besar yang dimiliki oleh TPI Depok masih ditempatkan di TPI Sadeng yang lebih dekat dengan wilayah Jawa Timur. Karena pelabuhan di Sadeng cukup besar dan kondisi perairan disana cenderung lebih tenang dari Pantai Depok. Hal ini terus dicarikan solusi untuk pemecahannya, namun dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit karena ini menyangkut dengan alam, sedangkan di wilayah Pantai Depok tidak ada pemecah ombak untuk dapat menangkal kuatnya ombak dan gelombang sehingga, secara teknis di Pantai Depok dalam waktu dekat ini tidak dapat dibangun pelabuhan atau dermaga untuk kapal. Hal ini diutarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (KKP DIY) sendiri, selain itu, untuk pembangunan pelabuhan besar di

Tanjung Adikarto juga sampai saat ini masih sangat diusahakan.

Untuk saat ini, Dinas KKP DIY membagi porsi dari tiap-tiap TPI dan pengelolaan laut di wilayah DIY. Hal ini terkait dengan perizinan dan juga penetapan kapasitas baik dari kapal yang digunakan dan juga sumber daya manusia yang diperbolehkan untuk mengeksplorasi hasil laut DIY. Dinas KKP juga mengatur pengelolaan dari penangkapan dan juga memberikan peringatan kepada para nelayan yang dengan sengaja melanggar peraturan yang ada, seperti contohnya dalam hal penggunaan peralatan dalam mencari ikan dan juga menangkap ikan dan fauna laut yang dilindungi. Namun, secara teknis, kepengurusan dari TPI ini sendiri dibawah dari Pemerintah Kabupaten, namun dari pemerintah kabupaten ini juga tetap berkoordinasi dengan Dinas KKP DIY. Kepengurusan ini mencakup program pelatihan, pengembangan dan kegiatan dari TPI itu sendiri.

Jika dilihat dari definisi dan tujuan, TPI itu hanya tempat pelelangan yaitu jual beli ikan, sedangkan untuk kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan itu masuk ke dalam kegiatan kelompok, sehingga hal ini menjadi kegiatan rutin sehingga pengurus dari TPI disini bertugas sebagai fasilitator untuk para nelayan, jadi TPI tidak bertugas sebagai pengurus dari kelompok

nelayan namun fungsinya adalah sebagai fasilitator.

### **C. Upaya Optimalisasi Peran TPI Depok Dalam Membangun Pertahanan Kawasan Pesisir**

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang di manfaatkan oleh nelayan terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak disektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk

meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di daerah. Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dalam dimensi lokalitas, agar dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional, pembanguan dilakukan secara terpadu, merata, dan berkeadilan serta menghindari egoisme sektoral dan distrik.

Keberadaan wilayah pesisir khususnya di pulau Jawa yang membentang luas, yang memanjang di pesisir pantai, yang memiliki peluang besar untuk mengolah dan

memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan atau laut yang terbentang luas di hadapannya, yang sekaligus dihadapkan pada masalah keamanan laut yang setiap saat dapat terjadi di wilayah perairan atau laut, yang berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat wilayah pesisir. Menjaga kelestarian lingkungan tidak cukup dengan memberikan dukungan saja, tetapi perlu adanya perlu tindakan nyata guna lebih memberikan dampak yang bermanfaat demi kelestarian lingkungan pesisir. Dari dinas kelautan dan perikanan telah menjalankan perannya untuk membantu memberikan pengawasan dan penjagaan di kawasan pesisir di pantai Parangtritis. Menurut Rudy Suharta dari dinas kelautan dan perikanan kabupaten sebelum kewenangannya dialihkan ke provinsi pada tahun 2013 telah membentuk desa mandiri dimana dinas kabupaten Bantul sebagai *leading sector* bersama masyarakat pesisir pantai parangtritis melakukan beberapa program seperti pengolahan ikan untuk menambah nilai agar memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat khususnya nelayan. Selain itu masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi menjaga keamanan dengan mengawasi wilayah pesisir pantai.

Gangguan keamanan yang terjadi di wilayah perairan atau laut dibedakan, yaitu:

- a. Gangguan keamanan yang berasal dari luar (*eksternal*), dapat dikemukakan, diantaranya:
  - 1) pencurian ikan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan negara luar (seperti Filipina, Thailand dan Malaysia).
  - 2) Penyelundupan barang-barang (barang elektronik, pakaian bekas, barang konsumsi (makanan, rokok, narkoba, dan sebagainya) yang dapat merugikan penerimaan serta merusak negara,
  - 3) Penyusupan imigran gelap dari negara bergolak (seperti Afganistan, dan sebagainya) menggunakan perahu, yang masuk melalui wilayah pesisir, dengan tujuan Australia atau Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, banyak imigran gelap dari vietnam atau kamboja menggunakan perahu, yang dikenal sebagai manusia perahu.
- b. Gangguan keamanan yang terjadi dari perbuatan orang-orang di dalam negeri (*internal*), dapat disebutkan, yaitu:
  - 1) Seperti penggunaan bom oleh nelayan untuk menangkap ikan, yang berdampak merusak lingkungan dan membahayakan terhadap keselamatan diri pelakunya dan,
  - 2) Terjadinya perompakan (perampokan di laut) yang mengganggu keamanan

kapal-kapal yang megangkut barang (Adisasmita, 2013).

Menurutnya pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan telah membantu dalam hal pengawasan melalui bidangnya yaitu bidang kelautan pesisir dan pengawasan berkoordinasi dengan dinas kabupaten dalam menjaga keamanan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menangkal dan mengatasi gangguan keamanan yang terjadi di wilayah perairan, maka sumber daya yang ada pada masyarakat pesisir dapat diberdayakan perannya, khususnya bagi para nelayan dilengkapi dengan alat komunikasi, yang setiap saat dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pos penjagaan keamanan di perairan atau laut yang dikelola oleh pihak Angkatan Laut seperti yang terdapat di wilayah Parangtritis yaitu Pos Keamanan Laut (PosKamLa) ataupun dinas kepolisian perairan dalam hal ini yang terdekat adalah kepolisian perairan Depok, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengamanan secepatnya, sehingga terjadinya gangguan keamanan di laut dapat diatasi dengan baik.

Nelayan penangkap ikan jumlahnya sangat banyak, tersebar di wilayah perairan laut, dapat dimanfaatkan perannya untuk membantu menjaga keamanan di laut. Perlu kita sadari bahwa wilayah perairan atau laut di pulau Jawa khususnya sangat luas, sedangkan

jumlah kapal patroli dan fasilitas penjagaan keamanan laut yang dimiliki Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Polisi perairan yang ada di tingkat provinsi sangat begitu terbatas, maka tingkat efektivitas penjagaan keamanan laut adalah juga terbatas, maka dalam hal ini peranan masyarakat pesisir pada umumnya dan nelayan penangkap ikan pada khususnya dapat dimanfaatkan dan diberdayakan perannya untuk membantu penjaga keamanan di laut, terhadap segala kemungkinan terjadinya gangguan keamanan di laut, baik gangguan yang dari luar yang sifatnya eksternal maupun gangguan yang berasal dari dalam yang bersifat internal. (Adisasmita, 2013) Jelaslah, bahwa peranan masyarakat pesisir khususnya nelayan sangat penting dan besar, yaitu dalam bidang ekonomi, yaitu untuk melangsungkan kehidupannya menangkap, mengolah, dan memasarkan komoditas ikan hasil tangkapannya pada satu pihak, dan di lain pihak dalam bidang keamanan di laut dapat dimanfaatkan dan diberdayakan perannya membantu penjagaan keamanan di laut. Perlu dibentuk dan diberdayakan Sistem Keamanan Lingkungan Maritim (Siskamlingmar). Sejalan dengan hasil wawancara dengan kepolisian perairan Pak Bayu saat ini telah terdapat kelompok masyarakat pengawas (PokMasWas) di Parangtritis. Kelompok tersebut dibentuk guna memberikan

pengawasan dan penjagaan di area wilayah pesisir pantai Parangtritis seperti contoh Contohnya pernah ada kejadian perahu imigran yang terombang ambing ditengah laut, nelayan melapor ke kita, dan kita membawa mereka dan dilaporkan ke dinas imigrasi untuk mengurus hal tersebut.

Jadi, dengan potensi ikan yang melimpah maka perlu adanya pengawasan dan penjagaan keamanan di wilayah pesisir. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan dan tidak ramah lingkungan kerap sekali terjadi dan juga merusak terumbu karang akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga perlu menjadi perhatian. Untuk memberikan keuntungan bagi nelayan sendiri, dukungan dari pemerintah sudah baik dengan membentuk kelompok masyarakat untuk mengawasi dan menjaga keamanan. Selain itu, peran pihak-pihak berwenang seperti TNI Angkatan Laut serta Polisi Perairan (Polair) juga sudah baik. Dalam proses pelelangan juga pihak dinas kelautan dan perikanan juga memberikan keamanan saat terjadi proses lelang, hal ini dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian serta kecurangan yang dilakukan oleh pedagang maupun oleh pemodal ataupun pengambil atau pengurus pelelangan. Dari segala aspek mulai penjagaan keamanan pesisir dan pengawasan tempat pelelangan ikan sudah

berjalan dengan baik. Yang perlu ditingkatkan adalah evaluasi kinerja yang selama ini belum dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam dimensi lokalitas, agar dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional, pembangunan dilakukan secara terpadu, merata, dan berkeadilan serta menghindari egoisme sektoral dan distrik.

Disisi lain, karena wilayah pesisir ini berbatasan langsung dengan negara/dunia luar maka selayaknya menjadi bagian dari basis pertahanan negara di samping untuk melindungi ketahanan mata pencaharian penduduk pesisir dari ancaman dan persaingan negara/dunia global. Namun, menurut pengelola TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, tantangan yang harus segera dicarikan solusi pemecahannya adalah pengembangan ekonomi seperti tuntutan adanya industri pengolahan hasil tangkapan dan budi daya perikanan, selain itu permasalahan tata ruang wilayah menuntut adanya master plan penataan secara spasial terpadu dengan menonjolkan konsentrasi sebagai wilayah pertanian lahan, pelelangan ikan, eksplorasi sumber daya mineral, dan wisata bahari.

Hal ini didasari oleh kondisi dari masyarakat pesisir yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, sedangkan kebutuhan mereka yang semakin meningkat. Melihat potensi sumber daya pesisir dengan

aktivitas kehidupan masyarakatnya, selayaknya pemerintah daerah secara mandiri maupun bermitra baik dengan para *stakeholder* dari dinas pemerintahan dan dengan sekalipun swasta untuk memilih pendekatan perencanaan pembangunan yang tepat bagi pengembangan wilayah tersebut. Perencanaan yang baik adalah yang mampu mengakomodasi semua yang mempunyai kepentingan dan juga memberi manfaat sehingga dapat dinikmati oleh semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah, swasta yang bermitra atau berinvestasi, maupun masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya dari kegiatan penangkapan dan pemasaran hasil ikan laut.

Menurut salah seorang pengurus dari TPI Depok, kendala dalam pengelolaan TPI ini sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dalam pendistribusian, semua ikan yang berhasil di tangkap dan jual melalui TPI semua laku terjual. Yang menjadi kendala paling besar adalah tidak menentunya hasil tangkapan dari para nelayan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti cuaca, ombak dan lain sebagainya. Selain itu, kendala paling signifikan adalah tidak adanya dermaga atau tempat kapal bersandar ke daratan. Hal ini karena kondisi alam tidak mendukung. Selain itu, terjadi pendangkalan daratan karena kondisi ombak yang kurang menentu. Sehingga dibutuhkan teknologi yang sangat mumpuni.

Pada penelitian ini, pihak terkait yang berkecimpung di dalam pengembangan kawasan pesisir mengatakan bahwa sejauh ini TPI sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun, perlu adanya perbaikan di beberapa sektor. Hal ini dirangkum dalam beberapa poin yang diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan dasar dalam pengembangan TPI dan pihak-pihak terkait kedepannya. Bentuk dukungan dan arahan yang harus dijalankan kedepannya tidak berpusat pada pengembangan dari TPI Depok semata, namun secara luas kepada seluruh kawasan pesisir laut selatan. Karena TPI merupakan bagian kecil dalam pengembangan masyarakat di kawasan pesisir yang kehidupannya bergantung dari hasil laut selatan pulau jawa.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa wilayah pesisir ini berbatasan langsung dengan negara/dunia luar maka selayaknya menjadi bagian dari basis pertahanan negara di samping untuk melindungi ketahanan mata pencaharian penduduk pesisir dari ancaman dan persaingan negara/dunia global. Maka perlu dukungan dari tiap *stakeholder* yang saling terkait. Maka dari itu, dalam kaitan untuk menguatkan pertahanan di kawasan pesisir, perlu adanya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, maka pendekatan dan model pengelolaan wilayah pesisir yang selama ini dominan dilaksanakan secara sektoral dan terpilah-pilah, saat ini TPI Depok khususnya

merupakan fasilitator dan regulator dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) dari para nelayan yang ada di wilayah Pantai Depok atau sebagai moderator dalam mengidentifikasi, memelihara dan mempromosikan, implementasi, serta evaluasi rencana pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara terpadu. Dengan demikian kerangka kerja proyek pesisir adalah proses dalam perencanaan, implementasi, dan *controlling* dalam menggunakan sumber daya pesisir yang berkesinambungan melalui peran aktif dan aksi-aksi bersama antar semua stakeholder. Berdasarkan hasil wawancara dan dari data serta dokumen yang mendukung penelitian ini, diambil beberapa upaya yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Membentuk Model Pengelolaan Wilayah Pesisir.
- b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Berbasis Sumberdaya Alam dan Masyarakat.
- c. Tata Ruang Wilayah Pesisir yang Dinamis dan Terpadu.
- d. Perangkat Regulasi.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok memiliki pengaruh dan peran yang baik terhadap meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir disekitar pantai, yaitu:
  - a. TPI Depok dapat menjadi fasilitator dan regulator untuk para nelayan yang ada di kawasan Pantai Depok. Selain itu mempermudah pendataan aktifitas nelayan seperti data penjualan ikan berdasarkan komoditasnya serta data hasil tangkapan para nelayan secara keseluruhan.
  - b. Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dilakukan dan dijalankan di Pantai Depok Bantul
2. Upaya optimalisasi peran TPI Depok dalam mendukung pertahanan kawasan pesisir. Hal ini sangat mendasar namun juga mendesak karena wilayah pesisir ini berbatasan langsung dengan negara luar maka selayaknya menjadi bagian dari basis pertahanan negara di samping untuk melindungi ketahanan mata pencaharian penduduk pesisir dari ancaman dan persaingan global. Maka dari itu perlu adanya dukungan dari setiap *stakeholder* yang berkecimpung didalamnya. Selain itu kawasan Pantai Depok saat ini sudah menjadi destinasi wisata baik bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam di Bantul maupun yang ingin menikmati hasil

tangkapan para nelayan (kuliner). Terdapat beberapa hal yang akan dilakukan kedepannya diantaranya:

- 1) Penjagaan keamanan kawasan pesisir dan juga proses lelang, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi nelayan dan masyarakat pesisir sekitarnya sehingga dapat memacu dalam meningkatkan jumlah tangkapan nelayan.
- 2) Bekerjasama dengan dinas terkait dalam pemberian penyuluhan atau seminar betapa pentingnya untuk menjaga keamanan pesisir dan menjaga kelestarian alam sekitarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- 3) Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir berbasis sumber daya alam dan masyarakat sehingga terciptanya tata ruang wilayah pesisir yang dinamis dan terpadu.

Penulis akan mencoba membuat rekomendasi berupa masukan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan instansi pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak akademisi maupun praktisi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah  
Beberapa saran terkait pengembangan tempat pelelangan ikan dan juga faktor-faktor terkait dalam pengembangan

kesejahteraan masyarakat pesisir dalam mendukung pertahanan negara. Diantaranya:

- 1) Mempermudah jalur akses informasi mengenai kondisi cuaca serta iklim untuk para nelayan;
- 2) Pemerintah harus meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir seperti tempat bersandar kapal atau perahu nelayan.
- 3) Meningkatkan kompetensi dalam pelelangan ikan dengan menambah peserta lelang di TPI.

Saran bagi penelitian selanjutnya berupa memperluas dari batasan penelitian, sehingga, besar harapan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggali strategi serta fenomena yang berkaitan dengan kelautan di wilayah pesisir pantai Depok khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ditambah lagi, DIY merupakan daerah potensial dengan melihat hasil dari data statistik yang telah disajikan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Laksda Dr. Ir. Supartono, M.M dan Marsma Dr. Tatan Kustana, M. Bus. M.A selaku dosen pembimbing tesis. Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy J. Rumambi., M.M; Letkol Sus Dr. Halkis M.A; serta Ir Bayu Asih Yulianto, M.Si selaku

dosen penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan dalam penulisan karya ilmiah maupun jurnal ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Ekonomi Maritim*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agoes, Kusnadi, Chandar. 2003. *Teori Dan Manajemen stres*. Malang: Taroda
- Anwar, S. 2016. *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bath, B.H.S. 1984. *Histo´ria Agra´ria da Europa Ocidental (500-1860)*, 3a ed., Editorial Presenc,a,Lisboa, 370pp.
- Bradford.John F. 2011. *The Maritime Strategy of the United States: Implications for Indo-Pacific Sea Lanes*.article: [online] tanggal (30 November 2015).
- BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. 2105. *Statistik Tempat Pelelangan Ikan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Darajati, W. 2004. *Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan*. Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP. Dinas Kelautan Dan Perikanan, Jakarta: Bappenas. (Online, diakses tanggal 18 September 2015 pukul 20.54 WIB, <http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/8223/>)
- Delinom M, Robert. 2007. *Sumber Daya Air Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: LIPI.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul. 2011-2015. *Laporan Review Rencana Strategis Kota Bantul*.
- Dooley.Howard J.2011. *The Great Leap Outward:China’s Maritime Renaissance*. article: [online] tanggal (30 November 2015)
- Franck.travis. 2009. *Coastal adaptation and economic tipping points*. article: [online] tanggal (30 November 2015)
- Hermawan, D. 2006. *Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru Untuk Industri Perikanan Terpadu*. E-jurnal. Universitas Muhammadiyah.
- Handoko, T. H. 2009 *Manajemen*. Edisi 2. BPFE: Yogyakarta
- Hasibuan, M. S. P. 2008 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sinar Grafika Offset : Jakarta
- International Maritime Organization. 1977. *Navigation through the Straits of Malacca and Singapore*. Resolution A.375(X). 14 November.
- Jones.Stephanie.2011. *Maritime piracy and the cost of world trade*. [online] tanggal (30 November 2015).

- Kartodirjo, S. 1993. *Sumber Daya Wilayah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kusumosuwisho, Drs. Sisdjiatmo. 1983. *Sajian Dasar Dalam Pengantar Teori Ekonomi Mikro*.
- Marganingrum, D. 2007. *Sumber Daya Air Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: LIPI.
- Natalia & Rene.(2015). *Global Maritime Axis: Indonesia, China, and a New Approach to Southeast Asian Regional Resilience*. *International Journal of China Studies* Vol. 6, No. 2, August 2015, pp. 175-185
- Octavian, Amarulla & Bayu A Yulianto. 2014. *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Park, Dr. Kwang Seo and Kildow, Dr. Judith T. (2014) "Rebuilding the Classification System of the Ocean Economy," *Journal of Ocean and Coastal Economics*: Vol. 2014, Article 4.
- Paul Van Deusen.(2009). *Achieving Conservation Goals in Managed Forests of the Southeastern Coastal Plain*. [online] tanggal (30 November 2015).
- Rahardjo, M.D. 2016. *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Said, B.D. 2012. *Ekonomi Pertahanan Nasional (Generik Studi Ekonomi Pertahanan)* Vol. 5 No. 17. [online] tanggal 29 September 2015 pukul 06.41 WIB, <http://www.fkpmaritim.org/wp-content/uploads/2012/08/Quaterdec-k-Nopember.pdf>
- Serafeim Polyzos and Dionissios Minetos.(2007). *Valuing environmental resources in the context of flood and coastal defence project appraisal*. [online] tanggal (30 November 2015).
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sutarno. 1999. *Manajemen Masyarakat*: Jakarta: Sagung Seto.
- Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

### **Tesis Dan Artikel Jurnal**

- Adam, Lukman. 2012. *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Kabupaten*

- Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara).
- Dianto, Muhammad Wahyu. 2012. Evaluasi Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan Di Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
- Dyah, S P. 2005. *Analisis Efisiensi TPI Kelas 1, 2, Dan 3 Di Jawa Tengah Dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*. Tesis. Program pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Djuara, Lubis. 2006. *Pengantar Pengembangan Masyarakat*. Tesis. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Putri, Andina Ramadhani. 2013. Kompetensi Manajer Dalam Meningkatkan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Samudera Mina Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
- Primayuda, A. 2002. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Buruh Nelayan Dan Pariwisata Di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Bogor
- Saputri, Rani Danik. 2013. Bentuk Interaksi Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Mina Bahari Empat Lima Depok Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta.
- Sinaga, Betharia Helena Rotua. 2012. Peranan Pelelangan Ikan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan Dan Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah (Studi Perbandingan Aktivitas Tpi Percut Dan Tpi Pekalongan).
- Wibowo, Dyan. 2005. Dermaga Kapal Nelayan Dan Tempat Pelelangan Ikan Regional Kabupaten Bantul.